

**ABSTRAK**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN  
PERDA No. 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai  
Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah**

DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Salah satu pengawasan DPRD terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh eksekutif. Kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan memuat aturan-aturan yang semestinya dipatuhi oleh berbagai pihak. Tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Banyak jenis pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya pungutan liar di sekolah yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru, pungutan biasanya berupa pembelian LKS, seragam sekolah, les dan lain sebagainya. Disini DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk melakukan pengawasan dan melakukan tindak lanjut dari pengawasan dengan menggunakan hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana mekanisme DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 2). Apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 3). Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan? 4). Bagaimana upaya DPRD dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan,?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimana penulis berusaha memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). DPRD Kota Bandung melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan cara langsung turun ke lapangan mengunjungi sekolah-sekolah dan menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat 2). Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan namun kurang optimal, ada beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan yaitu masalah ketebatasan waktu yang dimiliki DPRD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 3). DPRD menyikapi setiap masalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan rapat untuk mencari solusi dengan melibatkan LSM, melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, meningkatkan pengawasan 4). DPRD menyikapi terjadinya pelanggaran PPDB dan pungutan liar dengan menegur dinas pendidikan, mengusulkan anggaran lebih untuk pendidikan, mengadakan program bantuan siswa kurang mampu, mengadakan program penerimaan peserta didik jalur non akademis.

**Erna Eprilianti, 2013**

Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## ABSTRACT

MONITORING IMPLEMENTATION OF POLICY Government Area No. parliament. 20 OF 2002 ON THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION (Descriptive Study In Bandung City Council Regarding Abuse of illegal levies in schools)

Parliament is a legislative body that has legislative functions , budget and oversight . One of the parliament oversight of the policy has been made and dilaksanakan by executives. Regulation No. Policy . 20 of 2002 on the delivery of education contains the rules that should be obeyed by all parties . However , in practice there are still many violations encountered in the administration of education . Many types of violations in the administration of education , one of which illegal charges made by individual school principals and teachers , usually in the form of purchase LKS levies , school uniforms , tutoring and so forth . Here the parliament as representatives of the people required to supervise and conduct follow-up monitoring by using the Parliament the right to raise the right questions , the right to request information and the right to conduct an investigation . Research questions in this study include: 1 ) . What is the mechanism Parliament in carrying out oversight functions to the Regulation No. policies . 20 of 2002 on the organization of education ? 2 ) . What are the barriers or obstacles in the implementation of the policy supervision of Council Regulation No.20 of 2002 on the organization of education ? 3 ) . How solutions to overcome barriers or obstacles in the implementation of the policy supervision of Council Regulation No. . 20 of 2002 on the organization of education ? 4 ) . How to Parliament in an effort to prevent the violation of Bylaw No. policy . 20 of 2002 on the provision of education , eg bribery offense in school ? . Research method used in this research is descriptive qualitative approach in which the writer is trying to solve an actual problem with collecting data , preparing , applying and interpreting them . The results revealed that : 1 ) . Bandung City Council to supervise Regulation No. policies . 20 of 2002 on the organization of education in a way straight down to the field visiting schools and absorb various inputs and aspirations of the community 2 ) . Monitoring the implementation of the Council Regulation on the implementation of education policy is already running but is less than optimal , there are several barriers that result in less than optimal control of the issue of shortage of time and lack of Council owned public participation in oversight . 3 ) . Parliament to address any problems in the implementation of the Regulation on supervision of education to conduct a meeting to find a solution by involving NGOs , in cooperation with the government of Bandung, improved control 4 ) . Parliament PPDB addressing violations and extortion by calling the education, proposes more budget for education , conduct programs help disadvantaged students , students held a reception program nonacademic track .

**Erna Eprilianti, 2013**

Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu